

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah, Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 4);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2009 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 20011-2016;
- 11) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

- 12) Peraturan Bupati Rokan Hulu No 46 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 13) Peraturan Bupati Rokan Hulu No 71 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja

K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor -faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 telah melaksanakan 5 (lima) program dan 23 (Kegiatan) kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Kinerja terhadap masing-masing program dan kegiatan (Tabel. 1) telah dievaluasi dan dianalisis, seperti uraian berikut;

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) dengan anggaran sebesar Rp. 1.147.637.900.- dan telah terealisasi sebesar Rp. 956.771.750,- atau 83,37%. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari program ini adalah :

- (1) Jumlah Ketersediaan Beras, dengan persentase realisasi capaian terhadap target renstra 100%.
- (2) Jumlah Capaian Skor Pola Pangan harapan, dengan persentase realisasi capaian terhadap target renstra 100%.
- (3) Persentase Penurunan KK Rawan pangan, dengan persentase realisasi capaian terhadap target renstra 20,08%.
- (4) Jumlah Komoditas pangan segar yang diawasi dengan persentase realisasi capaian terhadap target renstra 100%.

Kegiatan yang mendukung tercapainya target IKU tersebut adalah:

a) Pemantauan dan analisis harga pangan pokok;

Kegiatan ini di implementasikan dengan melaksanakan pemantauan dan analisis harga pangan pokok di 16 pasar utama, kegiatan ini telah terealisasi 100% atau tersedianya data perkembangan harga pangan pokok selama 12 bulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan analisis harga pangan pokok selama tahun 2017 adalah, perkembangan harga pangan pokok Kabupaten Rokan Hulu selama satu tahun masih dalam keadaan wajar dan normal. Kesimpulan ini dapat menggambarkan bahwa kinerja sub sistem distribusi pangan telah berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah baik itu ditinjau dari jumlahnya, kecukupannya, kualitasnya maupun dari aspek keterjangkauannya. Seperti harga komoditi beras, selama tahun 2017 pertumbuhan harga beras di 16 pasar utama turun sebesar -1 % dimana rerata harga beras di pedagang pengecer sebesar Rp. 11.463/kg, dengan harga tertinggi sebesar Rp. 11.910 /kg yang terjadi pada bulan Desember, sedangkan harga beras terendah sebesar Rp. 11.140/kg yang terjadi pada bulan Maret 2017.

b) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Kegiatan ini di implementasikan dengan melaksanakan pembelian beras untuk cadangan pangan masyarakat terutama bagi daerah rawan bencana, sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu No.22

Tahun 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Rokan Hulu dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan:

- ❖ Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- ❖ Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan panceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana alam dan kerawanan pangan spesifik lokasi;
- ❖ Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
- ❖ Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien (mendadak dan sementara) terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan panceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Sampai akhir Tahun 2018 beras cadangan pangan daerah sebanyak 4 ton.

c) Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok lumbung pangan sebanyak 3 kelompok Tahun 2018 untuk sosialisasi sertifikasi legalitas lumbung pangan memiliki legalitas (Badan Hukum) jumlah pesertany adalah 150 orang. kegiatan pengembangan lumbung pangan desa juga melaksanakan kegiatan pembelian gabah untuk 3 kelompok lumbung pangan, di desa Karya Mulya, Pasir maju dan Lubuk Kerapat. Sampai dengan akhir tahun 2016 realisasi dari kegiatan ini hanya sebesar 50% atau terlaksananya sub kegiatan pembinaan lumbung pangan, sedangkan pembelian gabah tidak dapat direalisasikan karena pemahaman Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terhadap aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri RI nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari anggran belanja dan pendapatan daerah berbeda dengan maksud dan tujuan dari aturan tersebut. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bapak Rustam Koordinator Pengawas JFA Bidang APBD, Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau di-Pekanbaru tanggal 2 Desember 2016 adalah sebagai berikut (1) Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang

perubahan kedua dari permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus dibedakan dengan peraturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD, (2) Bahwa ide kegiatan yang ditetapkan oleh SKPD di RPJM, Renstra, RKPD, Renja SKPD serta RKA-SKPD yang merupakan tupoksi yang harus dijalankan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari OPD tersebut dibentuk tidak ada kaitannya dengan permendagri tersebut, (3) Atau dengan kata lain bahwa Program dan Kegiatan yang ditetapkan di Dokumen perencanaan tersebut merupakan langkah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota, (4) Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Renstra, RKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD, yang sub kegiatannya memfasilitasi/membantu masyarakat dalam bentuk barang dan belanja sosial yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran SKPD serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dapat dilaksanakan.

Upaya yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk meneruskan pengembangan cadangan pangan masyarakat adalah dengan memasukkan target pengadaan gabah di kegiatan Pengembangan lumbung pangan di dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2017 –

2021. Dan akan mengadakan sosialisasi pentingnya badan hukum kelompok serta pendampingan pengurusan badan hukum yang akan dituangkan dalam RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2018.

d) Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien

Kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan sosialisasi pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan sosialisasi sertifikasi legalitas LDPM. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat atau disebut LDPM. Disain utama ditujukan untuk menghadirkan lembaga ekonomi petani yang mampu berperan sebagai pembeli gabah minimal pada tingkat HPP dan dapat mengelola gabah tersebut, yaitu menyimpan dengan baik, mengolah menjadi beras dan memasarkan pada saat harga cukup tinggi sehingga dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Selain itu, untuk tujuan ketahanan pangan, lembaga ini harus mampu mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan, yaitu menyalurkan beras bagi anggota yang memerlukan saat paceklik dan menerima pengembalian plus jasa pengelolaannya saat panen raya. Proses Penguatan LDPM ini didisain dalam tiga tahap selama tiga tahun, yaitu Tahap Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian. Gapoktan yang berkinerja baik dalam tahap penumbuhan, pada tahun kedua naik ke tahap pengembangan. Apabila ada Gapoktan yang pada tahap penumbuhan tahun

pertama belum mencapai kinerja sesuai dengan yang ditetapkan, masih ada kesempatan bagi lembaga ini untuk meningkatkan kinerjanya dalam satu tahun lagi, sampai dinyatakan memenuhi syarat masuk ke tahap pengembangan. Kriteria Tahap Pengembangan adalah gudang sudah tersedia atau terbangun; pembelian gabah untuk kegiatan perdagangan minimal telah dua kali putaran dan membukukan keuntungan; sudah melakukan pengelolaan cadangan pangan; pencatatan atau pembukukan pengelolaan dana bansos, pembelian dan penjualan gabah dan pengelolaan cadangan pangan sudah dilaksanakan dengan rapi. Sampai Tahun 2018 baru dua LDPM yang sudah ditumbuhkan yaitu Gapoktan Rambah Baru Desa Rambah Kecamatan Rambah Samo di Tahun 2017 sudah meningkat menjadi PUPM dan Gapoktan Bangun Tani Desa Pasir Baru Kecamatan Rambah meningkat Tahun 2017 menjadi PUPM sedangkan untuk Gapoktan Tani Subur Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah belum bisa naik ketahap dua dikarenakan tanah atau lokasi pembangunan lumbung belum tersedia.

1. Persentase penurunan KK rawan pangan;

Jumlah KK miskin Kabupaten Rokan Hulu terpantau sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan terdiri dari 24 Desa dengan jumlah KK sebanyak 2.903 KK. Untuk Tahun 2017 untuk Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menargetkan penanganan penurunan rawan

pangan sebanyak 20 % sedangkan yang terealisasi hanya sebanyak 20,8%.

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target kinerja sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan.

2. Jumlah capaian skor pola pangan harapan;

Meningkatnya jumlah ketersediaan pangan daerah dalam bentuk energi dari 3.014 Kkal/kap/hari di tahun 2017 menjadi 3.036 Kkal/kap/hari di tahun 2017 tidak begitu signifikan, sehingga capaian kinerja sasaran ini hanya terealisasi 79 dari 79 yang ditargetkan atau 100%, karena pola konsumsi pangan masyarakat Rokan Hulu masih didominasi oleh pangan yang bersumber dari karbohidrat (beras) akan tetapi konsumsi sayur dan buah masih kurang atau rendah.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan yaitu:

a) Pengembangan pangan lokal

Dalam perencanaan kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan pelatihan pengolahan pangan lokal pada 5 desa yang masing-masing 4 kali pertemuan. Hal ini perlu dilakukan untuk

mengurangi permintaan dan ketergantungan bahan pokok beras. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah mengedukasi masyarakat bahwa ada bahan pangan lain, seperti jagung, ubi kayu, sagu, dan berbagai umbi-umbi lainnya, dan yang paling utama adalah sukun yang penanamannya sudah digalakkan di Kabupaten Rokan Hulu.

b) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan;

Dalam perencanaan kegiatan ini di implementasikan dengan melaksanakan survey dan analisis konsumsi pangan penduduk Rokan Hulu yang bertujuan untuk mengetahui secara riil tingkat konsumsi pangan penduduk.

c) Lomba Cipta Menu

Dalam perencanaan kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan Lomba Cipta Menu (LCM) Tingkat Kabupaten, LCM tingkat Provinsi dan LCM Tingkat Nasional. Lomba Cipta Menu (LCM) adalah lomba menciptakan menu masakan untuk keluarga sehari-hari dari bahan pangan local non beras non terigu, yang pesertanya dari tim PKK Kecamatan. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terciptanya 16 resep menu khas Rokan Hulu non beras yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Rokan Hulu.

Kegiatan Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan di Gedung Wanita Permaisuri Rokan Hulu pada

tanggal 12 Juli 2018 yang diikuti oleh 16 tim PKK Kecamatan se Rokan Hulu, Tim PKK Kecamatan Tambusai Utara Meraih Juara I yang berhak mewakili Tim PKK Rokan Hulu untuk mengikuti Lomba Cipta Menu tingkat Provinsi Riau.

Lomba Cipta Menu tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan di Gedung Wanita Provinsi Riau-Pekanbaru pada tanggal 8 Agustus 2018 yang diikuti tim PKK Rokan Hulu dan memperoleh juara harapan IV pada lomba tersebut.

Pelaksanaan Lomba Cipta Menu tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018 di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dimana tim LCM Provinsi Riau meraih juara satu kategori sarapan pagi dan kegiatan untuk Nasional bagi peserta tidak dicairkan karena Rokan Hulu yang datang hanya sebagai peninjau.

Sedangkan capaian terhadap tingkat realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan di Renstra sebesar 56,39% atau telah terciptanya resep menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) non beras dari target 80 resep menu B2SA di tahun 2018.

3. Jumlah Komoditas Pangan Segar yang Diawasi

Target kinerja tahun 2018 adalah 14 komoditas pangan yang diawasi dan semuanya terlaksana 100%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan yaitu:

a) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Dalam perencanaan kegiatan ini diimplementasikan dengan pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan pekarangan bagi masyarakat. Lahan pekarangan memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Hanya saja, pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Mayoritas masyarakat masih memanfaatkan lahan pekarangan seadanya saja, padahal jika dioptimalkan dapat ditanami beragam jenis tanaman yang bisa memenuhi ketersediaan pangan bagi keluarga. Pendekatan pengembangan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). Antara lain dengan membangun kebun bibit desa dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal, sehingga ketahanan pangan dan kelestarian alam terjaga. KRPL merupakan sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi

warga setempat. Tahun 2018 pelaksanaan sosialisasi ini sudah terlaksana untuk 2 kelompok atau 100%.

b) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Dalam perencanaan kegiatan ini diimplementasikan dengan pelaksanaan sosialisasi tentang peningkatan mutu dan keamanan pangan.

c) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Jumlah Pangan segar yang diawasi adalah sebanyak 14 komoditi sehingga target kinerja Tahun 2018 tercapai 100%.

d) Promosi dan Publikasi Ketahanan pangan

Jumlah Promosi yang telah dilaksanakan adalah 1 kali yaitu pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi yang dilaksanakan di pekanru dengan Target Kinerja Tahun 2018 tercapai 100 %

9) Jumlah benih ikan yang diproduksi

Target kinerja tahun 2018 adalah 2.000.000 benih dan semuanya terlaksana 6.590.433 ekor atau 100%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target

kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Budidaya

Perikanan dengan kegiatan yaitu:

a) Pengembangan bibit ikan unggul

b) Peningkatan sarana dan prasarana BBI

c) Peningkatan sarana dan prasarana BBI (DAK)

d) Peningkatan sarana dan prasarana Perikanan budidaya (DAK)

Produksi bibit ikan rokan hulu selain berasal dari BBI juga diproduksi oleh UPR (Unit Pembenihan Rakyat), sampai 2018 jumlah UPR yang aktif sebanyak 25 UPR.

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN WAJIB + URUSAN PILIHAN									
2	URUSAN PILIHAN									
2	01	PERTANIAN								
2	01.1	1.21.01	15							
		Program peningkatan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan modal Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	0 %	5,98%	36%	588,98%	85,43	0 %	588,98%
		Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya	0 %	250 poktan	1.570 poktan	1.520 Poktan	100	0 %	1.520 Poktan	96

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Targete Kinerja Capain Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
201.21.015.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya pembinaan dan penyaluran dana BLM PUAP pada Gapoktan untuk melakukan usaha Produksi Pertanian	0%	30 pembinaan unit usaha dan administrasi, 144 pembinaan Gapoktan PUAP	25 LKMA, 45 Gapoktan	144 pembinaan, 6 penumbuhan dan 5 peningkatan status menjadi LKMA	56% penumbuhan dan peningkatan status PUAP menjadi LKMA	0%	144 pembinaan, 6 penumbuhan dan 5 peningkatan status menjadi LKMA	98% penumbuhan dan pembinaan, 22% peningkatan status
201.21.015.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan sumberdaya manusia petani serta penyuluh lapangan, Terselenggaranya PEDANA KTNA se Propinsi Riau dan penilaian kemampuan kelompok tani	0%	250 Penilaian Poktan, 25 orang peserta Penas KTNA Malang Jatim	1.570 penilain poktan, 2.050 peserta Pedana dan Penas KTNA	1.500 penilai poktan, 2.075 peserta Pedana dan Penas KTNA	90,57% Penilaian Poktan, 50% peserta PENAS Malang Jatim	0%	1.500 penilai poktan, 2.075 peserta Pedana dan Penas KTNA	98% penilain poktan, 100% peserta Pedana dan Penas KTNA
201.21.016	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Jumlah cadangan pangan masyarakat Jumlah informasi ketersediaan pangan daerah	135.5 Kg/Kap/Tahun 135.5 Kg/Kap/Tahun	4,5 ton beras 2.930 kkal/kap/hari	69 ton beras 3.000 Kkal/kap/hari	31,7 ton beras 2.960 kkal/kap/hari	30,00 96,71	135.5 Kg/Kap/Tahun 135.5 Kg/Kap/Tahun	31,7 ton beras 2.960 kkal/kap/hari	45,94 98,67

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Targe Kinerja Capain Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra SKPD s/d tahun 2017					
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah desa rawan pangan yang dibina	15,65%	2 desa	15 Desa	8 desa	93,88	15,65%	8 desa	75,00				
		Jumlah sumber pangan alternatif	0	4.500 btg sukun	22.000 batang sukun	15.500 btg sukun	100,00	0	15.500 btg sukun	70,45				
2	0 1	1.21.0 1	1 6	0 3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan	Diketahuinya Pola Konsumsi Real Masyarakat sesuai dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan untuk mengetahui ketersediaan energi serta protein per Kapita.	1 dokumen	-	2 buku	1 buku	-	1 dokumen	1 buku	100,00
2	0 1	1.21.0 1	1 6	1 1	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan di Daerah sehingga tercipta stabilitas harga dan pasokan pangan	12 laporan	10 pasar utama	16 pasar utama dan 3 titik pantau	10 pasar utama	100	12 laporan	10 pasar utama	62,50
2	0 1	1.21.0 1	1 6	1 3	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersedianya cadangan pangan masyarakat guna mengantisipasi terjadinya kerawanan	20 ton beras	-	40 ton beras	10 ton beras	-	20 ton beras	10 ton beras	25,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Targe Kinerja Capain Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pangan								
2 0 1	1.21.0 1 6 4	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksananya pendampingan desa mandiri pangan	2 desa	20 desa	8 desa pendampinga, 153 desa pemetaan rawan pangan	50		8 desa pendampinga, 153 desa pemetaan rawan pangan	40% pendampingan dan 100% pemetaan desa rawan pangan
2 0 1	1.21.0 1 6 6	Pengembangan diversifikasi tanaman	Terlaksananya penanaman sumber pangan alternatif (sukun) di pekarangan	4.500 btg sukun	22.000 batang sukun	16.700 btg sukun	100,00		16.700 btg sukun	75,91
2 0 1	1.21.0 1 6 8	Pengembangan lumbung pangan desa	Terlaksananya pembangunan lumbung untuk penyimpanan cadangan pangan masyarakat	1 unit lumbung	3 unit pembinaan lumbung pangan, 7.500 kg gabah untuk cadangan pangan	22 unit lumbung 7 unit pembangunan lumbung	0% pembangunan lumbung, 100% pembinaan, 100% pengandaan gabah	1 unit lumbung	7 unit pembangun an lumbung	31,82
2 0 1	1.21.0 1 6 9	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terlaksananya model distribusi pangan yang efesien melalui Lembaga	2 LDPM	2 gapoktan pembinaan	14 gapoktan penumbunha n dan pembinaan	100	2 LDPM	3 penumbuha n, 5 pembinaan	35,71

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017					
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Distribusi Pangan Masyarakat												
2	0 1	1.21.0 1	1 6	2 2	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2 Kelompok	0	200 orang	120 orang	0	2 Kelompok	120 orang	60,00
2	0 1	1.21.0 1	1 6	3 0	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu - ibu rumah tangga dalam menyusun menu yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.	0	16 resep menu B2SA	80 resep menu B2SA	64 resep menu B2SA	100	0	64 resep menu B2SA	80,00
2	0 1	1.21.0 1	1 6	3 6	Pendampingan diversifikasi pangan	Terlaksananya pembinaan / pemberdayaan ibu - ibu rumah tangga (kelompok P2KP) dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber panganeekaragaman pangan segar bagi masyarakat	0 kelompok		50 kelompok	20 kelompok	0		20 kelompok	40,00

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Targe Kinerja Capain Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 0 1 2.01.0 1 1 7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah event promosi yang diikuti	0	1 kali	15 kali	9 kali	33,33	0	9 kali	60,00
2 0 1 2.01.0 1 7 0 7	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya promosi produksi unggulan daerah	0	1 kali	15 kali	9 kali	33,33	0	9 kali	60,00
2 0 1 1.21.0 1 2	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan Lapangan	Jumlah kelompok tani yang menerapkan paket teknologi tepat guna	0	0 poktan	1.520 poktan	503 poktan	0	0	503 poktan	33,092105
		Jumlah kantor balai penyuluhan yang memenuhi standar minimal sesuai dengan Permentan Nomor 51 tahun 2009	0	rata-rata kelayakan 9 BP 65%	5 BP	rata-rata kelayakan 9 BP yg ada 60%	-	0	rata-rata kelayakan 9 BP yg ada 60%	-

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Targete Kinerja Capain Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 0 1 1.21.0 1 2 0 1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian perkebunan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian lapangan (PPL)	0	1 angkatan diklat penyuluh, 130 BOP Penyuluh	5 kali pertemuan teknis, 14 angkatan diklat penyuluh, 130 Bop Penyuluh	3 kali pertemuan teknis, 3 angkatan Diklat penyuluh, 127 BOP Penyuluh	0% pertemuan teknis, 25% dilkat penyuluh, 100% BOP Penyuluh	0	3 kali pertemuan teknis, 3 angkatan Diklat penyuluh, 127 BOP Penyuluh	60% pertemuant teknis, 21,4% diklat penyuluhan, 80% BOP penyuluh
2 0 1 1.21.0 1 2 0 3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terwujudnya penyusunan program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa,. Terlaksananya pertemuan rutin penyuluh di UPTB serta terlaksananya kegiatan percontohan.	0	16 program kecamatan, 1 kabupaten kabupaten, 109 desa, 20 kali pertemuan rutin di BP, 0 unit percontohan	16 Program kecamatan, 1 programa Kabupaten, 153 programa desa, 20 kali pertemuan rutin di BP, 135 unit demplot, 24 unit demfarm, 180 demcara	16 Program kecamatan, 1 kabupaten, 153 desa, 20 kali pertemuan rutin di BP, 27 unit demplot, 6 unit denfarm, 445 unit demcara	85% penyusunan program, 100% pertemuan rutin, 0% percontohan	0	16 Program kecamatan, 1 kabupaten, 153 desa, 20 kali pertemuan rutin di BP, 27 unit demplot, 6 unit denfarm, 445 unit demcara	100% program, 100% pertemuan rutin, 20% demplot, 25% denfarm, 247% demcara

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 0 1 1.21.0 2 0 5	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan teknis penyuluhan pertanian	Terpenuhinya kelayakan Balai Penyuluhan sesuai dengan standart minimal Permentan No. 52. Tahun 2009.	7 BP pemagaran kantor, 9 Pemagaran Lahan BP, 9 BP peningkatan sarana prasarana	0 BP pembangunan kantor, 9 BP pengadaan sarana prasarana pemeliharaan	7 BP pemagaran kantor, 9 Pemagaran Lahan BP, 9 BP peningkatan sarana prasarana	6 BP pemagaran, 9 BP pemeliharaan, 1 pembangunan kantor BP, 1 unit pembangunan rumah jaga BP, 8 unit pemagaran BP, 9 BP peningkatan sarana prasarana	0 % pembangaunan Kantor BP, 100 pengadaan sarana prasarana pemeliharaan kantor	7 BP pemagaran kantor, 9 Pemagaran Lahan BP, 9 BP peningkatan sarana prasarana	6 BP pemagaran, 9 BP pemeliharaan, 1 pembangunan kantor BP, 1 unit pembangunan rumah jaga BP, 8 unit pemagaran BP, 9 BP peningkatan sarana prasarana	tidak di pesrsenkan karena dari 9 BP belum ada yg memenuhi standar yg dipersyaratkan
3 0 1 2.0.3. 2 0	Program Peengembangan Budidaya perikanan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan								
3 0 1 2.0.3. 2 0 1	Pengembangan Bibit Ikan unggul	Jumlah Pakan Ikan	16 ton pakan grower, 2 ton pakan Starter							

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Targe Kinerja Capain Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra SKPD s/d tahun 2017				
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
3 0 1	2.0.3. 1	2 0	1 0	Pelatihan Penerima bantuan sarana dan prasarana (Bansapras) Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Bansapras	8 Kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100	5 kelompok	5 kelompok	100
3 0 1	2.0.3. 1	2 0	1 3	Peningkatan sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	Jumlah Kelompok Bansapras	2 Kelompok	-	-	-	100	2 Kelompok	2 Kelompok	100
3 0 1	2.0.3. 1	2 1		Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100	2 Kelompok	2 Kelompok	100
3 0 1	2.0.3. 1	2 0	1 3	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK)	Jumlah Kelompok Bansapras	3 Kelompok	-	-	-	-	3 Kelompok	3 Kelompok	100
3 0 1	2.0.3. 1	2 3		Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Mutu Hasil pengolahan Produk	1 kali pelatihan dan 4 kali	4 kali	4 kali	3 kali	75	1 kali pelatihan dan 4 kali	1 kali pelatihan dan 4 kali	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Targe Kinerja Capain Program (renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 0 1 2.0.3. 1 3 2	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Produk Perikanan	Jumlah Pelatihan	1 kali pelatihan	-	-	-		1 kali pelatihan	1 kali pelatihan	100
3 0 1 2.0.3. 1 3 3	Sosialisai gemarikan	Jumlah sosialisai Gemar ikan	4 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
3 0 1 2.0.3. 1 6	Program Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi/lubuk larangan	3 kelompok	-	-	-	-	3 kelompok	3 kelompok	100
3 0 1 2.0.3. 1 6 1	Penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan (POKMASWAS)	Jumlah kawasan konservasi/lubuk larangan	3 kelompok	-	-	-	-	3 kelompok	3 kelompok	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan perikanan, dituntut untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan dan Perikanan daerah melalui penyelenggaraan penyuluhan yang profesional. Tugas pokok dan fungsi tersebut telah dituangkan, rencana strategis ini telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 tahun 2011. Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tersebut berisikan visi, misi, tujuan, asaran, program dan kegiatan serta telah dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk menilai capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan 5 (lima) tahunan yang realisasi telah dibahas pada poin sebelumnya.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010. Secara bertahap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu telah berhasil mencapai target

program dan kegiatan serta menerapkan standar pelayanan minimal tersebut (Tabel. 2) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah kelompok perikanan yang difasilitasi	Kelompok	40	11	27,5
2	Jumlah rumah tangga petani ikan	RTP	8.593	6.134	71,38
3	Jumlah kawasan konservasi dan lubuk larangan perikanan perairan umum yang diawasi	POKMASWAS	6	6	100
4	Jumlah produksi perikanan	Ton	10.912,21	8.500,18	77,90
5	Jumlah ketersediaan beras	kg/kap/tahun	137,3	137,3	100
6	Persentase penurunan KK rawan pangan	%	20	20,8	104
7	Jumlah capaian skor pola pangan harapan		79	79	100
8	Jumlah komoditas pangan segar yang diawasi	Komoditi	11	10	90,9
9	Jumlah benih ikan yang diproduksi	Benih	3.000.000	6.590.433	219,68

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 terhadap 9 (sembilan) target Indikator Kinerja Utama (IKU) rata-rata sebesar 99,04%, dengan uraian sebagai berikut.

1. Jumlah kelompok perikanan yang difasilitasi;

Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menargetkan 40 kelompok yang terfasilitasi, tetapi hanya terealisasi sebanyak 11 kelompok atau 27,5% karena adanya keterbatasan anggaran.

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target kinerja sasaran tersebut adalah Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap.

Kegiatan ini diimplementasikan dengan memberikan stimulan kepada nelayan dengan bantuan sarana dan prasarana penangkapan seperti perahu motor tempel dan alat tangkap terhadap 5 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan dengan jumlah 65 RTP Nelayan. Disamping itu juga memfasilitasi sehat nelayan yaitu penerbitan sertifikat atas tanah nelayan bekerjasama dengan BPN Rokan Hulu. Fasilitas juga diberikan untuk asuransi jiwa nelayan melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dasar hukumnya adalah Undang – Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,

Pembudidya Ikan dan Petambak Garam. Hal ini diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

2. Jumlah rumah tangga petani ikan (RTP Perikanan)

Untuk mewujudkan target kinerja sasaran ini ada pada 4 program perikanan yaitu : Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Program Pengembangan Budidaya Perikanan serta Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, karena semua kegiatan di 4 program ini melibatkan RTP Perikanan sebagai objek pengembangan; Jumlah RTP Perikanan Kabupaten Rokan Hulu pada sampai tahun 2018 adalah 6.134 RTP, atau tumbuh 5,29 % dari tahun sebelumnya. Akan tetapi belum bisa mencapai target 8.594 RTP. Pencapaian target RTP 2018 adalah 71,38 %.

3. Jumlah kawasan konservasi dan lubuk larangan perikanan perairan umum yang diawasi;

Adapun program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target kinerja sasaran ini adalah Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (POKMASWAS);

Dalam perencanaan kegiatan ini di implementasikan dengan melaksanakan pembinaan bagi kelompok pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan. Tahun 2018 pembinaan tetap dilakukan untuk 6 kelompok POKMASWAS dengan jumlah 30 RTP nelayan. Realisasi pencapaian target 100%.

4. Jumlah produksi perikanan;

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah 4 Program Perikanan yaitu : Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Program Pengembangan Budidaya Perikanan serta Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, semua kegiatan pada keempat program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk perikanan. Pada Program ini dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Gemar Ikan yang diimplementasikan dengan mengadakan lomba cipta menu serba ikan untuk mempromosikan ke masyarakat menu-menu yang berasal dari ikan dan cara pengolahannya, serta mengajak masyarakat gemar makan ikan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Pada tahun 2018 ini tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Rokan Hulu telah mencapai 37,58 kg/kapita/tahun. Walaupun sudah meningkat tetapi masih jauh dari tingkat konsumsi ikan secara nasional yaitu 54,49 kg/kapita/tahun. Peningkatan produksi

perikanan dan peningkatan angka konsumsi ikan adalah program nasional melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Jumlah Ketersediaan Beras kg/kap/tahun;

Tahun 2018 jumlah cadangan pangan masyarakat adalah sejumlah 76.368 Ton, jumlah ini merupakan akumulasi dari produksi yaitu 22.966 Ton dan pasokan sebesar 55.497 Ton, dengan demikian capaian terhadap target kinerja sasaran ketersediaan beras tahun 2018 tercapai 100% dari target yaitu 137,30 kg/kap/tahun.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran dari indikator ini adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan kegiatan yaitu:

e) Pemantauan dan analisis harga pangan pokok;

Kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan pemantauan dan analisis harga pangan pokok di 16 pasar utama, kegiatan ini telah terealisasi 100% atau tersedianya data perkembangan harga pangan pokok selama 12 bulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan analisis harga pangan pokok selama tahun 2018 adalah, perkembangan harga pangan pokok Kabupaten Rokan Hulu selama satu tahun masih dalam keadaan wajar dan normal. Kesimpulan ini dapat menggambarkan bahwa kinerja sub sistem distribusi pangan telah berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah baik itu ditinjau dari

jumlahnya, kecukupannya, kualitasnya maupun dari aspek keterjangkauannya. Seperti harga komoditi beras, selama tahun 2018 pertumbuhan harga beras di 16 pasar utama turun sebesar -1 % dimana rerata harga beras di pedagang pengecer sebesar Rp. 12.091/kg, dengan harga tertinggi untuk beras premium sebesar Rp. 14.373/kg yang terjadi pada bulan Mei, sedangkan harga beras terendah sebesar Rp. 10.073/kg yang terjadi pada bulan Agustus 2018.

f) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Kegiatan ini di implementasikan dengan melaksanakan pembelian beras untuk cadangan pangan masyarakat terutama bagi daerah rawan bencana, sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu No.22 Tahun 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Rokan Hulu dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan:

- ❖ Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;

- ❖ Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan panceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana alam dan kerawanan pangan spesifik lokasi;
- ❖ Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
- ❖ Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien (mendadak dan sementara) terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan panceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Sampai akhir Tahun 2018 beras cadangan pangan daerah sebanyak 4 ton.

g) Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok lumbung pangan sebanyak 3 kelompok untuk sosialisasi sertifikasi legalitas lumbung pangan dengan peserta 150 orang petani. Adapun tujuan dari sosialisasi legalitas ini adalah agar supaya kelompok lumbung pangan memiliki legalitas (Badan Hukum). Implementasi lain juga dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi lumbung pangan dengan tujuan mengenalkan kegiatan lumbung kepada petani, jumlah pesertanya adalah 50 orang petani. Sedangkan untuk mengetahui kondisi

ketersediaan pangan dalam menghadapi HKBN, maka diadakan rapat koordinasi ketersediaan pangan dengan jumlah peserta 50 orang. Kelompok yang didorong untuk mendapatkan sertifikasi legalitas adalah di desa Karya Mulya, Desa Pasir Makmur dan desa Rambah Baru yang berada di Kecamatan Rambah Samo.

h) Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien

Kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan sosialisasi pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan sosialisasi sertifikasi legalitas LDPM. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat atau disebut LDPM. Disain utama ditujukan untuk menghadirkan lembaga ekonomi petani yang mampu berperan sebagai pembeli gabah minimal pada tingkat HPP dan dapat mengelola gabah tersebut, yaitu menyimpan dengan baik, mengolah menjadi beras dan memasarkan pada saat harga cukup tinggi sehingga dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Selain itu, untuk tujuan ketahanan pangan, lembaga ini harus mampu mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan, yaitu menyalurkan beras bagi anggota yang memerlukan saat paceklik dan menerima pengembalian plus jasa pengelolaannya saat panen raya. Proses Penguatan LDPM ini didisain dalam tiga tahap selama tiga tahun, yaitu Tahap Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian. Gapoktan yang berkinerja baik dalam tahap penumbuhan, pada tahun kedua naik ke tahap pengembangan.

Apabila ada Gapoktan yang pada tahap penumbuhan tahun pertama belum mencapai kinerja sesuai dengan yang ditetapkan, masih ada kesempatan bagi lembaga ini untuk meningkatkan kinerjanya dalam satu tahun lagi, sampai dinyatakan memenuhi syarat masuk ke tahap pengembangan. Kriteria Tahap Pengembangan adalah gudang sudah tersedia atau terbangun; pembelian gabah untuk kegiatan perdagangan minimal telah dua kali putaran dan membukukan keuntungan; sudah melakukan pengelolaan cadangan pangan; pencatatan atau pembukukuan pengelolaan dana bansos, pembelian dan penjualan gabah dan pengelolaan cadangan pangan sudah dilaksanakan dengan rapi. Sampai Tahun 2018 sudah ada tiga LDPM yang sudah ditumbuhkan yaitu Gapoktan Rambah Baru Desa Rambah Kecamatan Rambah Samo di Tahun 2016 sudah meningkat menjadi PUPM dan Gapoktan Bangun Tani Desa Pasir Baru Kecamatan Rambah meningkat Tahun 2016 menjadi PUPM serta Gapoktan Tani Subur Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah, meskipun belum bisa naik ketahap dua dikarenakan tanah atau lokasi pembangunan lumbung belum tersedia, akan tetapi telah menjadi kelompok LDPM Kabupaten Rokan Hulu.

6. Persentase penurunan KK rawan pangan;

Jumlah KK miskin Kabupaten Rokan Hulu terpantau sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan terdiri dari 24 Desa dengan jumlah KK

sebanyak 2.903 KK. Untuk Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menargetkan penanganan penurunan rawan pangan sebesar 20% dan dapat terealisasi mencapai 20,8%.

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target kinerja sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan.

7. Jumlah capaian skor pola pangan harapan;

meningkatnya jumlah ketersediaan pangan daerah dalam bentuk energi mencapai 3.036 Kkal/kap/hari di tahun 2018, sehingga capaian kinerja sasaran ini terealisasi sebesar 79 dari 79 yang ditargetkan atau 100%, meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat Rokan Hulu, walaupun masih didominasi oleh pangan yang bersumber dari karbohidrat (beras), akan tetapi konsumsi sayur dan buah sudah mulai meningkat.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan yaitu:

a) Pengembangan pangan lokal

Dalam perencanaan kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan pelatihan pengolahan pangan lokal pada 5 desa yang masing-masing 4 kali pertemuan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi permintaan dan ketergantungan bahan pokok beras. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah mengedukasi masyarakat bahwa ada bahan pangan lain, seperti jagung, ubi kayu, sagu, dan berbagai umbi-umbi lainnya, dan yang paling utama adalah sukun yang penanamannya sudah digalakkan di Kabupaten Rokan Hulu.

b) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan;

Dalam perencanaan kegiatan ini di implementasikan dengan melaksanakan survey dan analisis konsumsi pangan penduduk Rokan Hulu yang bertujuan untuk mengetahui secara riil tingkat konsumsi pangan penduduk.

c) Lomba Cipta Menu

Dalam perencanaan kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan Lomba Cipta Menu (LCM) Tingkat Kabupaten, LCM tingkat Provinsi dan LCM Tingkat Nasional. Lomba Cipta Menu (LCM) adalah lomba menciptakan menu masakan untuk keluarga sehari-hari dari bahan pangan local non beras non terigu, yang pesertanya dari tim PKK Kecamatan. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terciptanya 16 resep menu khas Rokan Hulu non beras yang

Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Rokan Hulu.

Kegiatan Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan di Gedung Wanita Permaisuri Rokan Hulu pada tanggal 23 Juli 2018 yang di ikuti oleh 16 tim PKK Kecamatan se Rokan Hulu, Tim PKK Kecamatan Pagarantapah Darussalam Meraih Juara I yang berhak mewakili Tim PKK Rokan Hulu untuk mengikuti Lomba Cipta Menu tingkat Provinsi Riau.

Sedangkan Lomba Cipta Menu tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan di Gedung Gubernuran Provinsi Riau-Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2018 yang di kuti tim PKK Rokan Hulu dan memperoleh juara harapan tiga pada lomba tersebut.

Pelaksanaan Lomba Cipta Menu tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 Oktober 2018 di halaman Kantor Gubernur di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Kabupaten Rokan Hulu mengikuti acara LCM tingkat nasional sebagai peninjau.

Capaian terhadap tingkat realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan di Renstra sebesar 56,39%, karena keikutsertaan Kabupaten Rokan Hulu di Lomba Cipta Menu hanya sampai LCM tingkat Propinsi Riau.

- d) Promosi dan publikasi ketahanan Pangan

Kegiatan ini diimplementasikan dengan mengikuti even promosi pada Pameran MTQ Propinsi Riau ke XXXVII yang dilaksanakan tanggal 12 s/d 18 Desember 2018 yang bertempat di Areal Taman Mesjid Agung Annur Pekanbaru. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka capain kegiatan untuk tahun 2018 hanya terealisasi 99,98%.

8. Jumlah Komoditas Pangan Segar yang Diawas

Target kinerja tahun 2018 adalah 11 komoditas pangan yang diawasi dan realisasi adalah 10 komoditas dengan capaian 90,9%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan yaitu:

a) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Dalam perencanaan kegiatan ini diimplementasikan dengan pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan masyarakat. Lahan pekarangan memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Hanya saja, pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Mayoritas masyarakat masih memanfaatkan lahan pekarangan seadanya saja, padahal jika dioptimalkan dapat ditanami beragam jenis tanaman yang bisa memenuhi ketersediaan pangan bagi keluarga. Pendekatan pengembangan optimalisasi

pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). Antara lain dengan membangun kebun bibit desa dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal, sehingga ketahanan pangan dan kelestarian alam terjaga. KRPL merupakan sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat. Tahun 2018 pelaksanaan sosialisasi ini sudah terlaksana untuk 5 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 25 orang, artinya telah melibatkan 125 orang petani yang tersebar di beberapa kecamatan. Adapun selain untuk pengembangan pangan untuk gizi keluarga, kegiatan ini juga bermaksud meningkatkan pemberdayaan wanita sebagai pelopor untuk mensukseskan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

b) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Jumlah Pangan segar yang diawasi adalah sebanyak 10 komoditi sehingga target kinerja Tahun 2018 tercapai 90,9%.

9) Jumlah benih ikan yang diproduksi

Jumlah produksi benih pada tahun 2018 adalah 6.590.433 ekor, yang merupakan produksi dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan produksi Balai Benih Ikan (BBI). Target kinerja tahun 2018 adalah 3.000.000 ekor benih, sehingga realisasinya mencapai 219,68%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya target kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan yaitu:

- e) Pengembangan bibit ikan unggul
- f) Peningkatan sarana dan prasarana BBI
- g) Peningkatan sarana dan prasarana BBI (DAK)
- h) Peningkatan sarana dan prasarana Perikanan budidaya (DAK)

Produksi bibit ikan rokan hulu selain berasal dari BBI juga diproduksi oleh UPR (Unit Pembenihan Rakyat), sampai 2018 jumlah UPR yang aktif sebanyak 25 UPR.

Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditandatangani pada Desember 2018 seperti pada tabel 7 berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)		
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan	1	Jumlah kelompok perikanan yang difasilitasi	40 kelompok	Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan:		
		2					
		3	Jumlah rumah tangga petani ikan (RTP Perikanan)	8.593 RTP			
			Jumlah Produksi Perikanan	12.375,50 ton			
		3 KUB, 45 RTP	1	Pembinaan dan Pengembangan perikanan tangkap			279.999.000,-
		2 KUB	2	Pembinaan dan Pengembangan perikanan tangkap (DAK)			186.000.000,-
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan:			
		3 kali	1	Sosialisasi Gemar Ikan			344.321.000.00-
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan:			
		3 Kelompok	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)			243.881.000,-
	4	Jumlah Kawasan Konservasi dan Lubuk Larangan Perikanan Perairan Umum yang diawasi	6 POKMASWAS	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kegiatan:			

				3 Kelompok dan 1 kegiatan	1	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pengawas Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (POKMASWAS)	121.439.800,-
2	Meningkatnya Ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	1	Jumlah ketersediaan beras kg/kap/tahun	137,30 kg/kap/tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		
				12 laporan	1	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	62.000.000,-
				1 kali sewa/bongkar	2	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	7.400.000,-
				3 kelompok	3	Pengembangan lumbung pangan desa	60.000.000,-
				2 LDPM	4	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang efisien	60.000.000,-
		2	Persentase penurunan KK rawan pangan	20 %	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		
				5 desa	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	205.620.900,-
				1 kali	2	Peningkatan kapasitas dan operasional pengembangan kelembagaan dewan ketahanan pangan	25.069.800,-
		3	Jumlah capaian skor pola pangan harapan	79,00	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		
				3 lomba	1	Lomba Cipta Menu	411.438.000,-
				2 kali	2	Promosi dan publikasi ketahanan pangan	40.278.600,-
		4	Jumlah komoditas pangan segar yang diawasi	11 komoditi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		
				125 Rumah Tangga	1	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	191.012.500,-
				10 komoditas	3	pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	84.818.100,-

3	Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	1	Jumlah benih ikan yang di produksi	3.000.000 benih	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		
					Kegiatan:		
				18.300 kg pakan	1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	343.580.000,-
				1 BBI	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	399.995.000,-
				2 2BBI	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI (DAK)	909.907.300,-

Jumlah Anggaran : 5.941.779.350,-

Program Strategis : 3.976.761.000,-

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.941.779.350,- dengan rincian (1) anggaran untuk melaksanakan 5 (lima) program strategis sebesar Rp. 3.976.761.000,-, dan (2) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PPAP) sebesar Rp. 1.965.018.350,00,-

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga melaksanakan 1 (satu) Program dengan 3 (tiga) kegiatan alokasi dana Dekonsentrasi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebesar Rp. 630.800.000.00,-.

Dengan demikian Program Strategis tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah 6 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan diluar anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PPAP) dengan total anggaran sebesar Rp. 4.607.561.000.00,- (Empat Miliyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (UU RI No. 18 Tahun 2012).

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan

pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan

manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang Pangan serta mendiseminasikannya kepada Pelaku Usaha Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan penelitian dan pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan,

masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaku Usaha Pangan yang terdiri dari petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan merupakan bagian dari penyelenggara dan penyedia pangan, dan perlu untuk di tingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejateraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Diharapkan dengan menyatunya pembangunan ketahanan pangan dan perikanan dalam satu organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan serta berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku

utama dan pelaku usaha melalui para penyuluh yang profesional dapat tercapai.

Keberhasilan perwujudan ketahanan pangan daerah yang telah diraih seperti penjelasan sebelumnya, tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Dalam penganan daerah rawan pangan memerlukan data yang akurat, sedangkan data yang ada telah kadaluarsa (data pemetaan rawan pangan tahun 2006) padahal di dalam ketentuan SPM bidang ketahanan pangan data dan peta daerah rawan pangan hanya berlaku 3-5 tahun, ketiadaan data dan peta daerah rawan pangan yang valid sesuai dengan kondisi saat ini membuat usulan e-Proposal ke Badan Ketahanan Pangan-Kementerian Pertanian RI untuk program desa mandiri pangan tidak diakomodir;
2. UU No.12 tahun 2012 telah mengamanatkan dan mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan/mengadakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebanyak 100 ton ekuivalen beras, amanat ini telah diakomodir pada Renstra BKP3 namun hingga saat ini alokasi anggaran yang diterima belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
3. Salah satu data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah pangan adalah data perkembangan harga pangan pokok setiap periodik, untuk itu pemantauan harga pangan seharusnya dilaksanakan di pasar-pasar pada setiap kecamatan,

namun yang tertampung pada RKA DKPP tahun 2014 hanya ada pada 10 pasar.

4. Masih tingginya tingkat konsumsi beras penduduk (110,8 kg/kap/thn) antara lain disebabkan oleh belum tersedianya sumber bahan pangan lokal yang mudah untuk diperoleh, mudah untuk pengolahannya serta berada disekitar lahan pekarangan penduduk;
5. Pengetahuan maupun pemahaman masyarakat (baik itu petani sebagai produsen maupun konsumen) tentang produk pangan segar yang terbebas dari residu pestisida masih rendah;
6. Hingga saat ini perkembangan kreasi pengolahan pangan lokal belum sesuai dengan yang diharapkan (belum berkembang dimasyarakat), padahal Lomba Cipta Menu (LCM) pengolahan pangan lokal diadakan setiap tahun;
7. Belum semua masyarakat paham dan mengerti tentang tata cara pengolahan pangan yang baik sesuai dengan prinsip pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
8. Belum semua desa di Rokan Hulu menerima Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan desa yang telah menerima Program PUAP masih perlu untuk didampingi karena belum semua gapoktan PUAP mengerti dan paham tentang tata cara pembukuan;
9. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani belum berkembang dengan baik dan masih ada kelompok tani yang belum dikukuhkan;

10. Pelaku utama (petani) dan Pelaku Usaha belum sepenuhnya mampu untuk mempromosikan produk unggulannya secara mandiri sehingga masih perlu difasilitasi oleh pemerintah;
11. Tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap positif petani dalam penerapan teknologi anjuran masih rendah;

Permasalahan dan hambatan tersebut dapat mempengaruhi tingkat capaian program dan kegiatan serta mempengaruhi tingkat pelayanan BKP3 terhadap kepentingan masyarakat apabila tidak selesaikan atau diatasi. Dengan demikian rekomendasi dan catatan penting perlu disampaikan dalam Renja ini agar pelaksanaan program dan kegiatan kedepan berhasil mewujudkan tujuan pembangunan ketahanan pangan daerah yang berdaulat, mandiri dan tahan pangan yang berkelanjutan, seperti berikut:

1. Menjadikan kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah sebagai program prioritas;
2. Melaksanakan pendataan dan pemetaan daerah rawan pangan sampai dengan tingkat desa sesuai metode FSVA (Food security and Vulnerability Atlas) atau penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh melalui diklat teknis dan sistem penyuluhan;

4. Meningkatkan kemampuan gapoktan PUAP, LDPM dan Kelompok tani dalam terutama pengelolaan modal yang telah disalurkan pemerintah;
5. Mengakomodir usulan masyarakat/desa yang telah disampaikan melalui Musrenbang dalam pengembangan tanaman sukun sebagai alternative sumber bahan pangan lokal non beras untuk mengurangi tingkat konsumsi beras penduduk;
6. Meningkatkan standar minimal kelayakan dan pemanfaatan sarana dan prasaran 9 Balai Penyuluhan sesuai dengan Permentan No. 52 tahun 2009;
7. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Rokan Hulu sehingga mampu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang konkrit dan dapat diimplementasikan dengan mudah sehingga pewujudan ketahanan pangan daerah yang berdaulat, mandiri dan ketahanan pangan dapat segera dicapai.
8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang konkrit dengan tim Pengerak PKK tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa agar hasil Lomba Cipta Menu yang dilaksanakan setiap tahun dapat di masyarakatkan.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2019 telah mengacu pada Rencana Strategis Badan

Ketahanan Pangan dan Perikanan 2017-2021, serta telah mengakomodir kepentingan masyarakat yang disampaikan lewat musrenbang. Jumlah program dan kegiatan yang dirancangan dan telah ditetapkan didalam renstra pada tahun 2019 sebanyak 10 Program dan 4 kegiatan, yang membutuhkan dana sebesar Rp. 10.536.960.000,00.- Namun setelah dilaksanakannya review terhadap rancangan awal renja DKPP tahun 2019, kebutuhan anggaran untuk melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan tersebut menurun Rp. 3.112.379.851,00,-. Karena ada pengurangan anggaran terhadap kegiatan yang telah diusulkan melalui RKPD

Tabel. 3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN ROKAN HULU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan Tahun 2019					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Terwujudnya Pengembangan Budidaya Perikanan	140 kelompok	3.490.550	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rokan Hulu	Terwujudnya Pengembangan Budidaya Perikanan	100 kelompok	1.694.290	
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Rokan Hulu	Terlaksananya pengembangan Bibit ikan unggul	16 ton pakan	325.600	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Rokan Hulu	Terlaksananya pengembangan Bibit ikan unggul	14.320 kg	219.099.	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	Rokan Hulu	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	2 BBI	159.100	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	Rokan Hulu	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	2 BBI		
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	Rokan Hulu	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	1 BBI	1.487.300	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	Rokan Hulu	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	1 BBI		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan Tahun 2019					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinera	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinera	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	(DAK)		Prasarana BBI			(DAK)		Prasarana BBI			
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	Rokan Hulu	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	1 Kelompok	53.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	Rokan Hulu	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	1 Kelompok		
5	Pelatihan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana (BANSAPRAS) Perikanan Budidaya	Rokan Hulu	Meningkatnya Kemampuan kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana (BANSAPRAS) Perikanan Budidaya	8 kelompok	26.900	Pelatihan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana (BANSAPRAS) Perikanan Budidaya	Rokan Hulu	Meningkatnya Kemampuan kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana (BANSAPRAS) Perikanan Budidaya			
II	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rokan Hulu	Terwujudnya Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan		70.300					13.069	
1	Penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan	Rokan Hulu	Meningkatnya kelembagaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan	3 Kelompok	70.300	Penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan	Rokan Hulu	Meningkatnya kelembagaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan	3 kelompok	13.069	
III	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rokan Hulu	Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran		705.800					359.606	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan Tahun 2019					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
			produksi perikanan									
1	Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Produk Perikanan	Rokan hulu	Terlaksananya Pelatihan penanganan pasca panen pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1 kali	369.200	Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Produk Perikanan	Rokan hulu	Terlaksananya Pelatihan penanganan pasca panen pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				
2	Sosialisai Gemar Ikan	Rokan hulu	Meningkatnya kegiatan masyarakat dalam konsumsi ikan	4 kali	336.600	Sosialisai Gemar Ikan	Rokan hulu	Meningkatnya kegiatan masyarakat dalam konsumsi ikan	3 kali	359.606		
II	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)		Jumlah Ketersediaan beras Kg/Kap/tahun		4.043.950	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)		Jumlah Ketersediaan beras Kg/Kap/tahun		741.779.		
			Persentase Penurunan KK rawan pangan					Persentase Penurunan KK rawan pangan				
			Jumlah Capaian skor pola pangan harapan					Jumlah Capaian skor pola pangan harapan				
			Jumlah komoditas pangan segar yang diawasi					Jumlah komoditas pangan segar yang diawasi				
1	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Rokan Hulu	Tersedianya laporan analisi harga pangan pokok	12 laporan	64.800	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Rokan Hulu	Tersedianya laporan analisi harga pangan pokok	12 laporan	54.050		
2	Pengembangan Cadangan Pangan	Rokan Hulu	Terpenuhinya cadangan pangan	20 Ton Beras	212.300	Pengembangan Cadangan Pangan	Rokan Hulu	Terpenuhinya cadangan pangan				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan Tahun 2019					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah		daerah			Daerah		daerah			
3	Pengembangan lumbung pangan desa	Rokan Hulu	Terlaksananya pembangunan lumbung untuk penyimpanan cadangan pangan masyarakat	1 kelompok lumbung	139.000	Pengembangan lumbung pangan desa	Rokan Hulu	Terlaksananya pembangunan lumbung untuk penyimpanan cadangan pangan masyarakat	3 unit lumbung	49.430	
4	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Rokan Hulu	Meningkatnya gapoktasn yang memiliki model distribusi pangan yang efisien	2 LDPM	80.300	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Rokan Hulu	Meningkatnya gapoktasn yang memiliki model distribusi pangan yang efisien			
5	Penyusunan Data dan Informasi ketahanan pangan	Rokan Hulu	Tersedianya Data dan informasi ketahanan pangan	1 dokumen	17.300	Pengembangan lumbung pangan desa	Rokan Hulu	Tersedianya Data dan informasi ketahanan pangan			
6	Penanganan Daerah Rawan pangan	Rokan Hulu	Menurunnya Desa rawan pangan	5 desa	1.150.000	Penanganan Daerah Rawan pangan	Rokan Hulu	Menurunnya Desa rawan pangan	1 desa	62.144	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan Tahun 2019					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7	Peningkatan Kapasitas dan pengembangan kelembagaan dewan ketahanan pangan	Rokan Hulu	Meningkatnya kapasitas dewan ketahanan pangan	6 kali	52.900	Peningkatan Kapasitas dan pengembangan kelembagaan dewan ketahanan pangan	Rokan Hulu	Meningkatnya kapasitas dewan ketahanan pangan	1 kali	38.329	
8	Pengembangan Cadangan pangan pemerintah desa	Rokan Hulu	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Desa	5 ton	156.900	Pengembangan Cadangan pangan pemerintah desa	Rokan Hulu	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Desa			
9	Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan Suplai Pangan	Rokan Hulu	Tersedianya data pola konsumsi dan suplai pangan	1 dokumen	83.300	Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan Suplai Pangan	Rokan Hulu	Tersedianya data pola konsumsi dan suplai pangan			
10	Lomba Cipta menu	Rokan Hulu	Terciptanya resep menu baru khas rokan hulu	3 lomba	434.200	Lomba Cipta menu	Rokan Hulu	Terciptanya resep menu baru khas rokan hulu	3 lomba	406.306	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan Tahun 2019					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
11	Pengembangan Pangan lokal	Rokan Hulu	Meningkatnya Jumlah Pangan lokal	3 komoditi	61.400	Pengembangan Pangan lokal	Rokan Hulu	Meningkatnya Jumlah Pangan lokal			
12	Promosi dan Publikasi Ketahanan Pangan	Rokan Hulu	Meningkatnya promosi dan publikasi ketahanan pangan	3 kali	315.300	Promosi dan Publikasi Ketahanan Pangan	Rokan Hulu	Meningkatnya promosi dan publikasi ketahanan pangan			
13	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Rokan Hulu	Tersediannya sumber bahan pangan dan gizi keluarga	5.500 rumah tangga	865.500	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Rokan Hulu	Tersediannya sumber bahan pangan dan gizi keluarga	50 rumah tangga	80.115	
14	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Rokan Hulu	Tercapainya penerapan standar mutu dan keamanan pangan	4 kelompok	283.250	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Rokan Hulu	Tercapainya penerapan standar mutu dan keamanan pangan			
15	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	Rokan Hulu	Meningkatnya keamanan pangan segar	12 komoditas	1273.500	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	Rokan Hulu	Meningkatnya keamanan pangan segar	16 komoditas	51.403	

1.5. Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/200/II/BANGDA/2008 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adapun tahapan-tahapan yang dilalui telah dilaksanakan DKPP sebagai berikut;

1. Melakukan identifikasi target capaian kinerja program dan kegiatan DKPP tahun 2018 dan proyeksi capaian tahun 2019 dan membandingkan terhadap sasaran dan target Renstra DKPP dan RPJMD Rokan Hulu.
2. Membentuk tim penyusunan Rencana Kerja DKPP tahun 2019
3. Mengikuti musrenbang di 16 Kecamatan, serta menerima usulan dari pemangku kepentingan tingkat kecamatan untuk dijadikan bahan penyusunan Renja DKPP tahun 2019.
4. Menginventarisasi usulan masyarakat yang disampaikan melalui proposal dan menyesuaikannya dengan Renstra DKPP dan menjadikannya sebagai salah satu rencana kerja DKPP tahun 2019
5. Tim penyusunan Renja DKPP tahun 2019 melaksanakan rapat, yang menghasilkan rumusan usulan Renja DKPP tahun 2019 yang akan dibawa dalam pembahasan bersama BAPEDA.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan perikanan adalah untuk membangun kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan baik ditingkat makro (nasional) maupun ditingkat mikro (rumah tangga/individu). Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral pembangunan nasional yang harus dirumuskan secara terpadu dan serasi. Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan ketahanan pangan menjadi prioritas ke-5. Selanjutnya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan, meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Dengan demikian, mengacu pada RPJMN kebijakan pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ketersediaan pangan;
- b. Mengembangkan sistem distribusi pangan;
- c. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan;
- d. Membangun sistem pendukung ketahanan pangan yang kondusif.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan nasional tersebut telah sejalan dengan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan/menyelenggarakan urusan rumah tangga Kabupaten Rokan Hulu bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan serta bimbingan teknis terhadap pegawai Badan Ketahanan Pangan Dan Perikanan;
- c. Mengkoordinir instansi terkait dalam rangka pengamanan ketahanan pangan daerah;
- d. Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang ketahanan pangan dan Perikanan kepada Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan Perikanan yang sejalan dengan kebijakan nasional, yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan pangan;
- b. Pengembangan cadangan pangan;
- c. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien;
- d. Menjaga stabilitas harga pangan;
- e. Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan;
- f. Melaksanakan diversifikasi pangan;
- g. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan;
- h. Mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi;
- i. Mengembangkan sumberdaya manusia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DKPP

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsinya. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan tujuan yang diemban Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah " Mewujudkan Pengembangan ekonomi yang berbasis keraknyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta anatar kelompok masyarakat"

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rokan Hulu merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan, yang sesuai dengan visi yang telah ditetapkan yaitu "Mewujudkan Pengembangan ekonomi yang berbasis keraknyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta anatar kelompok masyarakat. Visi ini merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Rokan Hulu yaitu.

Diyakini dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan di Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tujuan pembangunan yang diamanatkan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk "Meningkatkan Struktur Perekonomian Daerah Yang Lebih Tangguh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif " dapat diwujudkan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pengurangan kemiskinan, yaitu penanganan Desa Rawan Pangan hingga saat baru 15 desa dari 53 desa yang tercatat di tahun 2006.
- b. Pencapaian MDGs, yaitu belum semua penduduk terbebas dari kerentanan kekurangan pangan hal ini ditandai dengan belum mampunya produksi pangan Rokan Hulu untuk memenuhi kebutuhan

- pangan penduduk atau penduduk Rokan Hulu masih tergantung kepada pasokan pangan dari luar sebesar 60% lebih
- c. Pengentasan kemiskinan, yaitu belum semua pelaku utama (petani) mempunyai akses yang baik terhadap teknologi tepat guna, sarana dan prasana serta permodalan dalam berusaha tani untuk meningkatkan pendapatan agar terbebas dari kemiskinan;
- d. Pencapaian SPM, yaitu belum semua SPM dibidang ketahanan pangan tercapai dengan baik seperti (1) masih tingginya ketergantungan sumber ketersediaan energi dan protein dari luar daerah (diatas 60%), (2) belum tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah desa serta masih rendahnya jumlah ketersediaan pangan masyarakat, (3) masih tingginya tingkat konsumsi beras penduduk sehingga skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum tercapai, (4) belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang ditandai dengan masih dijumpainya/beredarnya bahan pangan segar yang tercemar bahan kimia yang mengganggu kesehatan, serta masih rendahnya pengetahuan petugas, pelaku utama (petani) dan konsumen tentang pentingnya bahan pangan segar terbebas dari residu bahan kimia, (5) belum tertanganinya semua daerah rawan pangan yang ada.
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu belum maksimalnya pemanfaatan potensi pekarangan sebagai sumber penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, masih banyak lahan-lahan yang berpotensi

belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan.

Upaya untuk menindak lanjuti pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan yang belum terealisasi dengan baik maka pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merencanakan untuk melaksanakan 56 (lima) Program dan 31 (Tiga Puluh satu) kegiatan diluar kegiatan yang ada dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PPAP), yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dilaksanakan dengan 14 kegiatan yang membutuhkan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 4.043.950.000,00.-. Pelaksanaan kegiatan ini menyebar ke seluruh wilayah Rokan Hulu, dengan sasaran desa yang terdata sebagai daerah rawan pangan, ibu-ibu rumah tangga penerima manfaat program P2KP, daerah sentra produksi pangan (padi) dan penyebaran bibit sukun untuk ditanam dilahan pekarangan masyarakat sebagai sumber penyediaan bahan pangan lokal non beras.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan dengan 5 kegiatan yang membutuhkan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 3.490.550.000,00.-. dengan sasaran memfasilitasi pelaku utama

(petani) dan pelaku usaha dalam memperkenalkan produk unggulan nya.

3. Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan 1 kegiatan yang membutuhkan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 20.100.000,00.- dengan sasaran kelembagan masyarakat dibidang perikanan dapat meningkat.
4. Program Optimaliasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan yang membutuhkan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 705.800.000,00.- dengan sasaran masyarakat lebih meningkat dalam mengkonsumsi ikan.
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dilaksanakan dengan 1 kegiatan yang membutuhkan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 70.3200.000,00.- dengan sasaran masyarakat nelayan lebih sejahtera.
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan dilaksanakan dengan 1 kegiatan yang membutuhkan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 463.500.000,00.- dengan sasaran masyarakat pembudidaya ikan.

Dengan demikian total jumlah anggaran yang dibutuhkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk melaksanakan 6 (empat) program dan 31 (kegiatan) tersebut sebesar Rp. 8.794.200.000,00,-

(Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

TABEL. 5.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN N+1
KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN N+1	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.	03 PANGAN								
2.	03. 01. 16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	JumlahKetersediaanberas kg/kap/tahun						
			Jumlahpenangananadaerahrawanpangan						
			JumlahCapaianSkorPolaPanganHarapan						
			% KeamananPangan yang dikonsumsi						
2.	03. 01. 16. 01.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya penanganan desa rawan pangan	Kab. Rokan Hulu	5 Desa dan 1 peta rawan pangan	1.150.000.000	APBD	3 Desa	370.800.000
2.	03. 01. 16. 03.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan	Terlaksananya survey pola konsumsi pangan masyarakat	Kab. Rokan Hulu	1 dok	83.300.000	APBD		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN N+1	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 03. 01. 16. 09.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk sumber pangan	Kab. Rokan Hulu	5.520 rumah tangga	865.500.000	APBD		5.530 rumah tangga	891.500.000
2. 03. 01. 16. 11.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Terlaksananya pemantauan harga pangan pokok	Kab. Rokan Hulu	12 laporan	64.800.000	APBD		12 laporan	66.800.000
2. 03. 01. 16. 13.	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersedianya cadangan pangan masyarakat guna mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan	Kab. Rokan Hulu	20 ton beras	212.300.000	APBD		20 ton beras	218.700.000
2. 03. 01. 16. 18.	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Terlaksananya pengembangan lumbung pangan masyarakat	Desa Pasir Jaya	1 Unit Lumbung	139.000.000	APBD		1 Unit Lumbung	143.100.000
2. 03. 01. 16. 19.	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Terlaksananya model distribusi pangan yang efisien melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Desa Bangun Purba Timur Jaya, dan Kelurahan Rokan IV Koto	2 LDPM	80.300.000	APBD		2 LDPM	82.700.000
2. 03. 01. 16. 22.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya sosialisasi mutu dan keamanan pangan	Desa Rambah Muda dan Pematang Tebih	6 Kelompok Tani	283.250.000	APBD		67Kelompok Tani	291.700.000
2. 03. 01. 16. 39.	Lomba Cipta Menu	Terlaksananya Lomba Cipta Menu (LCM)	Kab. Rokan Hulu, Prop. Riau dan Nasional	3 Lomba	434.200.000	APBD		3 Lomba	447.300.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN N+1	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 03. 01. 16. 40.	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Kab. Rokan Hulu	6 kali	52.900.000	APBD		6 kali	54.500.000
2. 03. 01. 16. 41.	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Desa	Terlaksananya pengembangan cadangan pangan pemerintah desa	Kab. Rokan Hulu	5 ton beras	156.900.000	APBD	Belum terlaksana	5 ton beras/1 gudang	161.600.000
2. 03. 01. 16. 42.	Pengembangan Pangan Lokal	Terbinanya kelompok wanita dalam pengolahan pangan lokal dari hasil pemanfaatan pekarangan	Desa Pasir Utama, Payung Sekaki, Kel. Kota Lama, Kepenuhan Br, Tandun Barat	3 komoditi	61.400.000	APBD		3 komoditi	63.200.000
2. 03. 01. 16. 43.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	Terlaksananya uji laboratorium bahan pangan segar	Kab. Rokan Hulu	13 komoditas	127.500.000	APBD		14 komoditas	131.300.000
2. 03. 01. 16. 44.	Promosi dan Publikasi Ketahanan Pangan	Terlaksananya promosi dan publikasi ketahanan dan perikanan	Kab. Rokan Hulu	3 kali	315.300.000	APBD		3 kali	324.700.000
2. 03. 01. 16. 45.	Penyusunan Data dan Informasi Ketahanan Pangan	Terlaksananya penyusunan buku informasi ketahanan pangan	Kab. Rokan Hulu	1 dokumen	17.300.000	APBD		1 dokumen	17.800.000
2. 03. 01. 20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah benih ikan yang diproduksi							
		Jumlah kelompok perikanan yang difasilitasi							

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN N+1		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Jumlah penerapan teknologi perikanan tepat guna								
		Jumlah ikan langka lokal yang dikembangkan								
		Jumlah kawasan konservasi dan lubuk larangan perikanan perairan umum yang diawasi								
2.	03. 01. 20. 01.	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlaksananya penyediaan pakan untuk bibit ikan unggul	Kab. Rokan Hulu	16 ton pakan grower, 2 ton pakan starter	325.600.000	APBD		16 ton pakan grower, 2 ton pakan starter	335.300.000
2.	03. 01. 20. 03.	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan	Kab. Rokan Hulu	22 kelompok	618.000.000	APBD	Belum terlaksana	22 kelompok	636.500.000
2.	03. 01. 20. 04.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana BBI	Kab. Rokan Hulu	5 kelompok dan 5 UPR	206.000.000	APBD		5 kelompok dan 5 UPR	212.100.000
2.	03. 01. 20. 05.	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana BBI	Kab. Rokan Hulu	2 BBI/ tahun	159.100.000	APBD		2 BBI/ tahun	163.800.000
2.	03. 01. 20. 08.	Domestikasi ikan langka lokal	Terlaksananya Domestikasi Ikan Langka Lokal	Kab. Rokan Hulu	410 ekor	301.000.000	APBD		Pemeliharaan	72.200.000
2.	03. 01. 20. 09.	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI (DAK)	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana BBI dari dana DAK	Kab. Rokan Hulu	1 BBI/ tahun	1.485.260.000	APBD		1 BBI/ tahun	1.531.900.000

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2017

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN N+1	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 03. 01. 20. 10.	Pelatihan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana (BANSAPRAS) Perikanan Budidaya	Terlaksananya penyaluran bantuan sarana dan prasarana (BANSAPRAS)	Kab. Rokan Hulu	8 kelompok	26.800.000	APBD		8 kelompok	27.700.000
2. 03. 01. 20. 11.	Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan Perikanan	Terlaksananya Pengujian sampel	Kab. Rokan Hulu	100 sampel	55.650.000	APBD		100 sampel	57.000.000
2. 03. 01. 20. 12.	Pelestarian Sumberdaya Ikan	Terlaksananya Pelestarian Sumberdaya Ikan	Kab. Rokan Hulu	3 kawasan	257.500.000	APBD		3 kawasan	265.225.000
2. 03. 01. 20. 13.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kab. Rokan Hulu	2 kelompok	257.500.000	APBD		2 kelompok	55.100.000
2. 03. 01. 21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah kelompok perikanan yang difasilitasi							
2. 03. 01. 21. 06.	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya pembinaan dan pembentukan kelembagaan nelayan	Kab. Rokan Hulu	3 koperasi nelayan	70.300.000	APBD		3 koperasi nelayan	72.400.000
2. 03. 01. 23.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah penerapan teknologi perikanan tepat guna							
2. 03. 01. 23. 02.	Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Produk Perikanan	Terlaksananya pembinaan penanganan pasca panen dan pengelolaan produk	Kab. Rokan Hulu, Propinsi dan Nasional	1 kali	369.200.000	APBD		1 kali	380.200.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN N+1	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 03. 01. 23. 03.	Sosialisasi Gemar Ikan	Tertlaksana Sosialisasi Gemar Ikan	Kab. Rokan Hulu	4 kali	336.600.000	APBD		4 kali	346.600.000
2. 03. 01. 26.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah penerapan teknologi perikanan tepat guna							
2. 03. 01. 26. 01.	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (POKMASWAS)	Tertlaksana pembinaan dan penguatan kelembagaan POKMASWAS	Kab. Rokan Hulu	3 kelompok	20.100.000	APBD		3 kelompok	20.700.000
	TOTAL JUMLAH				8.794.200.000				7.919.825.000

IV. PENUTUP


Penyusunan dokumen rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2018 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2017-2021.

Dokumen rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini juga meliputi rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 yang memuat informasi tentang sasaran dan tujuan yang ingin dicapai serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan dan Perikanan daerah yang mantap, stabil dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Demikian dokumen rencana kerja ini disusun, dengan harapan dokumen ini dijadikan pegangan dan panduan bagi semua pimpinan dan staf Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019.

Pasir Pengaraian, Maret 2019.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ROKAN HULU


Ir. H. SRI HARDONO, MM
NIP. 19591226 198903 1 007